

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah proses merubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan *capital investment* dan *human investment* bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau *income per capita* naik (Hasibuan, 1987: 12). Suparmoko, pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (2002: 5). Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, yaitu :

- a. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus.
- b. Suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/*income per capita*.
- c. Kenaikan *income per capita* itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987: 12).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan

rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan bisa memotivasi peningkatan kreativitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah agar pembangunan di setiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pemerintah daerah tingkat satu memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah tingkat satu harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987: 82). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Hal ini dikarenakan ada banyak faktor yang mendukung dalam proses pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah melimpahnya sumber daya alam yang masih belum dikelola secara maksimal, tingginya jumlah penduduk Provinsi Lampung dan adanya dukungan letak wilayah Provinsi Lampung yang sangat strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan antara pulau Jawa dan pulau Sumatera dan ditambah lagi dengan posisinya yang dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi yaitu daerah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tasik dan Bekasi) yang kesemuanya ini merupakan daerah pusat pertumbuhan di pulau Jawa. Sehingga dengan posisi yang strategis ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan, walaupun kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2008 (dalam juta rupiah).**

Tahun	PDRB atas dasar harga berlaku	PDRB atas Dasar Harga Konstan
2004	36.004.821	28.262.289
2005	39.934.089	29.397.248
2006	49.118.988	30.861.360
2007	60.921.966	32.694.890
2008	74.490.599	34.414.653

*Sumber : BPS, Lampung Dalam Angka Tahun 2009.*

Pada Tabel 1 terlihat bahwa kenaikan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode tersebut selalu mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung selalu mengalami kenaikan. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2007. Pada tahun 2007 PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga konstan sebesar 32.694.890 (dalam juta rupiah) naik menjadi 34.414.653 (dalam juta rupiah) pada tahun 2008.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan desentralisasi yang semestinya akan terdapat berbagai perubahan dalam kebijakan pembangunan nasional. Maka seyogyanya pemerintah daerah lebih aktif dalam mengolah potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus terus berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai stimulus rencana pembangunan ekonomi masing-masing daerah. Sesuai dengan pendapat Samuelson bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, perubahan teknologi dan inovasi yang digunakan. Maka dalam tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi diperlukan upaya dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan baik yang berasal dari perimbangan pusat dan daerah dan pendapatan asli daerah.

Perkembangan penerimaan daerah provinsi Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2 dimana komposisi dan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan baik jumlah maupun proporsi pendapatan dari subsidi masih tetap naik, tetapi proporsinya terhadap total penerimaan sudah mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2004 PAD Provinsi Lampung hanya 422.059.080 (dalam ribu rupiah) dan mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga pada tahun 2008 telah mencapai nilai 945.918.152 (dalam ribu rupiah). Ini menunjukkan bahwa penggalan dana oleh pemerintah daerah provinsi melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

**Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004-2008 (Dalam Ribu Rupiah).**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Jumlah
2004	422.059.080	346.750.906	5.790.000	774.599.986
2005	563.739.264	399.594.000	7.456.680	970.789.944
2006	658.531.379	609.812.170	10.388.560	1.278.732.109
2007	714.576.591	672.630.170	12.000.000	1.399.206.761
2008	945.918.152	790.692.610	13.500.000	1.750.110.762

*Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka (data diolah) Tahun 2009.*

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan modal yang memadai. Disinilah peran investasi yang merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan

pertumbuhan nasional melalui pos penerimaan negara sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah. Perkembangan investasi di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perkembangan Investasi Pemerintah Dan Swasta  
Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2008  
(Dalam Miliar Rupiah).**

Tahun	Investasi		Total Investasi
	Swasta	pemerintah	
2004	4.422	1.574	5.996
2005	3.075	1.911	4.986
2006	5.546	2.417	7.963
2007	5.434	2.907	8.341
2008	2.818	3.434	6.252

*Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka Tahun 2009 (Data Diolah).*

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat kita ketahui bahwa nilai investasi di Provinsi Lampung selama lima terakhir ini sangat fluktuatif. Investasi swasta (*privat investment*) yang merupakan total dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 5.545 (dalam miliar rupiah). Sedangkan untuk investasi pemerintah (*public investment*) yang merupakan keseluruhan dari nilai APBD mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 8.340 (dalam miliar rupiah).

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah itu sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokalnya masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.

**Tabel 4. Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi Lampung  
Tahun 2004 – 2008 (Dalam Jiwa).**

Tahun	Bekerja	Persentase	Angkatan Kerja
2004	2.985.164	91.05	3.278.512
2005	3.100.608	91.53	3.387.499
2006	3.064.139	90.87	3.371.828
2007	3.281.351	92.42	3.550.483
2008	3.313.553	92.85	3.568.770

*Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka Tahun 2009.*

Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang besar. Seseuai dengan pendapat Samuelson bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari Tabel 4 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja apabila dipersentase selalu diatas 90 persen. Pada tahun 2007 jumlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Lampung mencapai 3.281.351 (jiwa) dari total angkatan kerja yaitu sebanyak 3.550.483 (jiwa). Pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan yaitu mencapai 3.313.553 (jiwa) dengan jumlah orang yang

bekerja mencapai 3.568.770 (jiwa) atau mencapai 92.85%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang ada sangatlah sedikit dan juga lapangan pekerjaan yang ada dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Sumbangan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta serta peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (*bottom up*) agar pembangunan yang dilaksanakan daerah merupakan keinginan bersama dan sesuai dengan potensi yang ada agar kesinambungan pembangunan dapat tercapai.

## **B. Permasalahan**

Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan daerah. Begitupun juga peran swasta dalam meningkatkan modal pembangunan dan membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mampu memperluas kesempatan kerja. Besarnya potensi sumber daya alam dengan didukung oleh letak wilayah yang strategis yang dekat dengan daerah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tasik, dan Bekasi) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Tetapi besarnya potensi sumber daya alam dan posisi yang strategis tidak membuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tumbuh dan berkembang bahkan di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih jauh tertinggal oleh daerah-daerah lainnya yang di Sumatera. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah pola hubungan antara PAD,



investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Lampung dalam rentang waktu selama 20 tahun yaitu antara tahun 1990 sampai dengan 2009?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 1990 - 2009.

### **D. Kerangka Pikir**

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai modal dalam pembangunan ekonomi dan peluang investasi yang prospek karena didukung letak wilayahnya yang sangat strategis dan dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi yaitu JABODETABEK. Untuk melihat bagaimana bentuk korelasi antara PAD, investasi, tenaga kerja dan

PDRB maka digunakan analisis koefisien korelasi *pearson*. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan murni yang di gali dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa belanja pembangunan yang mana investasi dalam pembangunan dapat dinyatakan pada nominal yang terdapat dalam APBN atau APBD, dimana sebenarnya seluruh angka-angka pada APBD merupakan investasi pemerintah (*public investment*). Selain itu pihak swasta dalam perkembangan ekonomi juga memberikan kontribusi positif, yakni dengan melakukan investasi yang biasa di kenal dengan *privat investment*. Perbandingan investasi pemerintah dengan swasta berkisar antara 30% – 70 % terhadap total investasi. (Prasetyo ; 2002).

Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana daripada pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan

pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah itu sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokalnya masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra, 2005 mengadakan penelitian dengan judul Hubungan Perkembangan Ekonomi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Lampung Timur untuk mengetahui hubungan antara masing-masing sektor PDRB terhadap penerimaan daerah dan untuk mengetahui upaya pajak dari PDRB terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2000-2004. Dengan menggunakan model persamaan analisis korelasi *pearson (product moment)*.

$$r = \frac{\sum x}{\sqrt{(\sum x^2) (\sum y^2)}}$$

Dimana:

r = koefisien korelasi

X = nilai tambah masing-masing sektor penyumbang PAD  
(ribu rupiah)

Y = perkembangan PAD (ribu rupiah)

(Sugiyono, 2003; 182)

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah sektor-sektor yang memberikan hubungan yang signifikan terhadap PAD. Sedangkan sektor-sektor lainnya seperti sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa merupakan sektor yang kurang memiliki hubungan yang signifikan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Lampung Timur.

Setianingrum, 2005 mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Beserta Pengeluaran Pembangunan Di Kabupaten Blora Tahun 2000-2004. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan menggunakan model persamaan.

$$r_x = \pi r^z = \frac{n \sum X - \sum X \sum Y}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi antara variabel x dengan variabel y

$\sum xy$  = jumlah prediktor x dan y

$\sum x^2$  = jumlah kuadrat dari kreterium x

$\sum y^2$  = jumlah kuadrat dari kreterium y

N = jumlah subyek

(Suharsimi Arikunto, 1996: 162).

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan.

yunarko, 2007 melakukan penelitian dengan judul analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda dan di transformasikan dalam bentuk logaritma dengan menggunakan kuadrat terkecil dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Ln } y = a + \beta_1 \text{ Ln } x_1 + \beta_2 \text{ Ln } x_2 + \beta_3 \text{ Ln } x_3 + \mu_i$$

Dimana :

y = PDRB

x<sub>1</sub> = Tingkat Investasi

x<sub>2</sub> = Pendapatan Asli Daerah

x<sub>3</sub> = Tenaga Kerja

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> = koefisien masing-masing variabel

a = konstanta

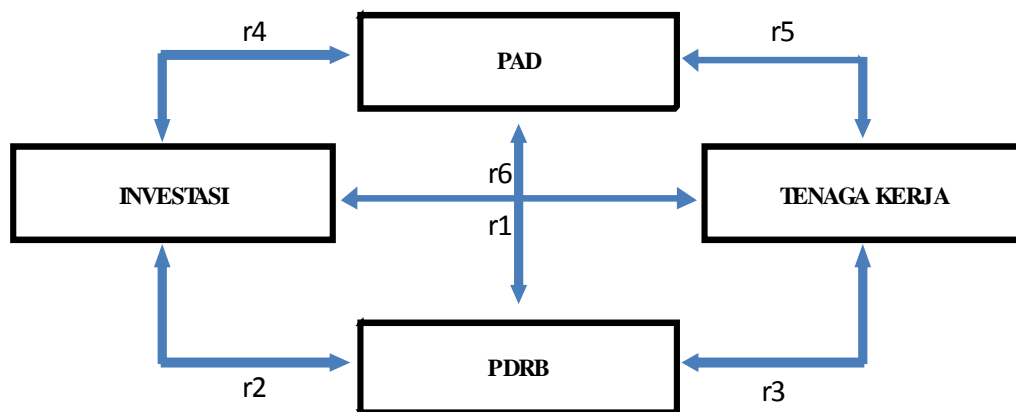
μ<sub>i</sub> = residu

(Algifari,2000:65)

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan uji f diketahui nilai f sebesar 24,974 dengan signifikansi 5 persen sehingga diketahui secara bersama-sama

Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunarko menitikberatkan penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB dimana dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa faktor tersebut berpengaruh terhadap PDRB. Maka yang membedakan dengan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pola hubungan antara PAD, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB. Dan penelitian ini juga mengambil lokasi di Provinsi Lampung, sedangkan studi kasus penelitian sebelumnya dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana pola hubungan antara PAD, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB. Untuk melihat bagaimana pola hubungan tersebut maka dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka pikir

Berdasarkan gambar 1 di atas maka terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat yang masing - masing saling berkorelasi. Pada gambar di atas yang menjadi variabel terikatnya adalah PDRB dan yang menjadi variabel bebasnya

adalah PAD, Investasi dan Tenaga Kerja. Untuk mengetahui pola hubungan dari variabel yang ditelaah maka gambar di atas menjelaskan bagaimana pola hubungan antara PDRB dan PAD ( $r_1$ ), PDRB dan Investasi ( $r_2$ ), PDRB dan Tenaga Kerja ( $r_3$ ), PAD dan Investasi ( $r_4$ ), PAD dan Tenaga Kerja ( $r_5$ ) dan pola hubungan antara Investasi dan Tenaga Kerja ( $r_6$ ).